

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangguran merupakan suatu kenyataan yang dihadapi semua negara, baik negara sedang berkembang maupun negara-negara yang sudah maju. Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan suatu masalah besar karena akan menyebabkan penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis bagi angkatan kerja (Manikw, 2010). Adanya pengangguran akan menurunkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah-masalah sosial dalam masyarakat.

Salah satu karakteristik dari pengangguran di Indonesia adalah tingginya jumlah pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja sedang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan dengan tingkat pendidikan minimal SMA/ sederajat dan keatasnya (Lipsey, 1997; Tambunan, 2001; Tobing, 2005; Elfindri dan Bachtiar, 2004; Manikw, 2010; Adrimas, 2012; Pasay dan Indrayanti, 2012; BPS, 2018). Di negara berkembang, pengangguran terdidik adalah sebagai konsekuensi dari berperannya faktor penawaran "*supply factors*" (Bloom dan Sevilla 2003).

Berdasarkan data pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan diketahui bahwa jumlah pengangguran pada tahun 2015 adalah 7,56 juta orang mengalami penurunan 2016 menjadi 7,03 juta orang namun pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 7,04 juta orang. Berdasarkan jumlah pengangguran tersebut ternyata didominasi oleh pengangguran terdidik yaitu 62,89 persen pada tahun 2015 dan mengalami penurunan menjadi 60,56 persen pada tahun 2016 namun pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 62,41 persen. Selanjutnya berdasarkan tingkat pengangguran terdidik pada masing-masing tingkat pendidikan diketahui bahwa pada tahun 2015 tingkat pengangguran terdidik tamat SMK adalah 11,65%, 10,32% tamat SMA, 7,54% tamat Akademi/Diploma dan 6,40% tamat Universitas. Pada tahun 2016 tingkat pengangguran terdidik tamat SMK adalah 11,11%, 8,72% tamat SMA, 6,04% tamat

Akademi/Diploma dan 4.87% tamat Universitas. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terdidik tamat SMK adalah 11.41%, 8.29% tamat SMA, 6.88% tamat Akademi/Diploma dan 5.18% tamat Universitas (BPS, 2019).

Berdasarkan data terlihat bahwa ada sebuah fenomena, dimana angkatan kerja tamatan SMK yang sudah dipersiapkan untuk memasuki pasar tenaga kerja tetapi persentase tingkat penganggurnya mengalami peningkatan dibandingkan tamatan SMA yang tidak dipersiapkan untuk memasuki pasar tenaga kerja. Fenomena berikutnya adalah masih banyak tamatan perguruan tinggi (Akademi maupun Universitas) yang menganggur. Hal ini tentunya akan menjadi masalah yang serius bagi dunia pendidikan di Indonesia karena tingginya pendidikan seseorang tidak ada jaminan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan.

Tingginya jumlah pengangguran terdidik di Indonesia merupakan masalah yang serius bagi Indonesia dan diperlukan upaya-upaya nyata agar dapat keluar dari permasalahan ini dan tentunya dibutuhkan suatu kajian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah pengangguran tenaga kerja terdidik di Indonesia serta apa saja solusi dalam menekan tingkat pengangguran terdidik tersebut. Pengangguran terdidik merupakan kekurangselarasan antara perencanaan pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja. Hal tersebut merupakan penyebab utama terjadinya jenis pengangguran ini. Faktanya lembaga pendidikan di Indonesia hanya menghasilkan pencari kerja, bukan pencipta kerja. Padahal, untuk menjadi seorang lulusan yang siap kerja, mereka perlu tambahan keterampilan di luar bidang akademik yang mereka kuasai. Disisi lain para pengangguran terdidik ini lebih memilih pekerjaan yang formal dan mereka mempunyai kemauan bekerja di tempat yang langsung menempatkan mereka di posisi yang baik, dapat banyak fasilitas, dan langsung mendapat gaji besar.

Salah satu faktor yang dapat menjadi pembenaran kondisi demikian adalah friksi pencarian yang terjadi di pasar kerja. Eksistensi *search friction* pada pasar kerja akan menghasilkan durasi menganggur bagi pencari kerja, yaitu pencari kerja akan selalu membutuhkan waktu untuk mendapatkan pekerjaan. Friksi dalam pencarian dapat mengganggu proses *matching* pada pasar kerja. Dalam kondisi

ekonomi yang berjalan dengan baik friksi masih tetap ada, terlebih ketika kondisi ekonomi memburuk dan pasar kerja berjalan tidak normal.

Dalam analisis mikro, pengangguran dihubungkan dengan lama mencari kerja (*duration of job search*) yang tergantung pada tingkat upah yang ditawarkan (*wage offer*), tingkat upah minimum yang diinginkan (*reservation wage*), dan *opportunity cost* dari mencari pekerjaan (McCall, 1970). Durasi menganggur merupakan deskripsi masalah baru atas fenomena pengangguran terdidik yang tidak pernah diselesaikan. Durasi menganggur adalah masa tunggu seseorang mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan terakhir (Ihan dan Yousef, 2013). Analisis friksi pasar kerja yang menyebabkan adanya durasi menganggur secara teoritis dijelaskan dalam disiplin *labor economics* dalam konteks penawaran tenaga kerja secara individual. Analisis tersebut penerapannya pada pasar tenaga kerja dipelopori oleh Stigler (1961; 1962) dan dikembangkan lebih lanjut oleh trio ekonom pemenang nobel ekonomi 2010 yakni Diamond (1982), Mortensen (1977; 1984; 1985; 1986), dan Pissarides (1982; 2010). Model analisis ini lebih dikenal sebagai *job search theory*. Teori ini telah mengalami banyak perkembangan dan menjadi salah satu teori yang mapan dalam disiplin *labor economics* namun masih sangat jarang digunakan dalam menganalisis masalah pengangguran terutama di Indonesia.

Beberapa studi empiris dilakukan dengan mengadaptasi pendekatan *search theory* dengan menghubungkan benefit yang diterima selama menganggur, karakteristik individu pencari kerja, karakteristik rumah tangga pencari kerja, dan besaran tingkat upah reservasi yang ditentukan oleh pencari kerja dengan durasi menganggur. Studi tersebut dilakukan oleh Foley (1997); Heath (1999); Lalive (2002); Hinnsaar (2004); Kupets (2007); Carolina, et al (2008); Brown (2010). Studi empiris seperti yang dikemukakan di atas memperlihatkan bahwa keputusan apakah menerima pekerjaan dan mengorbankan kemungkinan untuk menemukan pekerjaan yang lebih baik, atau menolak suatu tawaran pekerjaan untuk melanjutkan pencarian agar mendapatkan tawaran yang lebih baik, tergantung pada karakteristik individu pencari kerja yang merupakan penawaran dari tenaga kerja.

Penelitian ini mengkaji pengangguran terdidik dan durasi menganggur di Indonesia dari sisi *supply* mengembangkan model *job search theory*. Pada sisi penawaran, pengangguran terdidik diduga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Pendidikan formal sangat instrumental dan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu sehingga pendidikan dianggap sebagai investasi modal manusia dalam industri (Woodhall dan Psacharopoulos, 1997).

Banyak riset yang menemukan bahwa tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kecenderungannya menjadi pengangguran akan semakin kecil (Ashenfelter dan Ham, 1979; Foley, 1997; Kettunen, 1997; Takii, 1997; Moen, 1999; Grogan, *et.al*, 2001; Tansel dan Tasci, 2004; Stark dan Fan, 2011; Riddel dan Song, 2011; Khan dan Yousef, 2013; Baah-Boateng, 2013; 2015; Ordine dan Rose, 2015; Skenderi dan Uka, 2015). Selanjutnya riset yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin pendek durasi menganggurnya (Moeis, 1992; Foley, 1997; Kettunen, 1997; Takii, 1997; Grogan, *et.al*, 2001; Tansel dan Tasci, 2004; Khan dan Yousef, 2013; Ordine dan Rose, 2015; Skenderi dan Uka, 2015). Namun ada penelitian yang menemukan bahwa pendidikan berhubungan searah dengan durasi menganggur yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin panjang durasi menganggurnya (Pasay dan Indrayanti, 2012).

Rata-rata lama sekolah penduduk umur > 15 tahun diketahui meningkat dari tahun 2016 dan 2017 yaitu 8,33 dan 8,53 tahun. Berdasarkan data ini dapat dinyatakan bahwa tingkat pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan, namun ironisnya tingkat pengangguran terdidik juga mengalami peningkatan. Hal ini tentunya suatu masalah yang cukup memprihatinkan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, namun jumlah pengangguran terdidik juga mengalami peningkatan.

Pengangguran terdidik juga diduga disebabkan oleh pelatihan kerja. Angkatan kerja yang belum sudah pernah mengikuti pelatihan kerja tentunya akan memperkecil peluangnya menjadi pengangguran. Pelatihan kerja ini akan dapat membantu orang mendapatkan pekerjaan. Sansale, dkk (2019) menyatakan perlunya program pelatihan kerja bagi angkatan kerja muda agar memiliki

keterampilan memasuki dunia kerja. beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pelatihan kerja yang diikuti oleh angkatan kerja akan memperkecil peluangnya menjadi pengangguran (Powell, 1983; Baah-Boateng, 2013; 2015). Selanjutnya beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pelatihan kerja akan mengurangi durasi menganggur seseorang (Khan dan Yousef, 2013; Cheron dan Terriau, 2018).

Pengalaman kerja juga merupakan sebuah faktor yang diidentifikasi menjadi penyebab seseorang menjadi pengangguran. George (2004) menyatakan bahwa pengembangan mutu modal manusia dapat melalui pengalaman kerja. Dengan pengalaman kerja, seseorang dapat meningkatkan keterampilannya sehingga dapat berkerja lebih efisien dan efektif, yang tentunya tenaga kerja yang memiliki pengalaman kerja akan memiliki peluang lebih besar untuk dapat diterima bekerja. Menurut McConnel (1999) menjelaskan tenaga kerja yang berpengalaman lebih terampil dalam menyelesaikan pekerjaannya. Angkatan kerja yang memiliki pengalaman kerja akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan (Sutomo, dkk, 1999). Adanya pengalaman kerja akan mempermudah seseorang untuk mendapatkan pekerjaan sehingga durasi durasi menganggurnya lebih pendek dibandingkan dengan yang tidak memiliki pengalaman kerja (Ashenfelter dan Ham, 1979; McConnel, 1999; George, 2004). Namun ada penelitian yang menemukan berbeda yaitu penelitian Blanco dan Preugschat (2018) menemukan bahwa pada umumnya perusahaan lebih suka menerima pelamar yang belum pernah bekerja sehingga yang memiliki pengalaman kerja berpeluang menganggur dibandingkan dengan yang tidak memiliki pengalaman kerja.

Pengangguran terdidik diduga juga dipengaruhi oleh faktor umur. Fenomena yang menjadi salah satu pusat perhatian di Indonesia adalah masalah durasi menganggur dari pencari kerja usia muda yang semakin panjang durasinya, sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran usia muda (*youth unemployment*) berada pada tingkatan yang cukup tinggi (ILO, 2012). Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi umur seseorang maka peluang dia menjadi pengangguran akan semakin rendah atau orang muda berpeluang menganggur dibandingkan dengan angkatan kerja yang tidak muda lagi (Johnson and Layard, 1993; Foley, 1997; Aryeetey, et al., 2014; Baah-Boateng, 2013; 2015; Albanesi dan

Sahin, 2018; Sansale, dkk, 2019). Selanjutnya beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa durasi menganggur angkatan kerja usia muda lebih panjang dari yang tua (Foley, 1997; Tansel dan Tasci, 2004; Khan dan Yousef, 2013). Namun ada penelitian lain yang menemukan bahwa semakin tua umur seseorang maka durasi menganggurnya semakin panjang (Hernaes, 1999; Zarotiadis dan Theodossiou, 2010; Mukoyama, 2004; Sansale, dkk, 2019).

Jenis kelamin atau gender juga merupakan salah satu variabel penyebab pengangguran dan durasi menganggur. Penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa jenis kelamin atau gender adalah penyebab pengangguran (Foley, 1997; Theodossiou dan Zangelidis, 2009; Baah-Boateng, 2013; 2015; Albanesi dan Sahin, 2018). Durasi menganggur juga diduga dipengaruhi oleh jenis kelamin atau gender. Foley (1997) menyatakan wanita cenderung lebih lama menganggur dibandingkan dengan laki-laki dan wanita yang sudah menikah ditemukan mengalami masa pengangguran yang jauh lebih lama dibandingkan dengan pria yang sudah menikah. Tansel dan Tasci (2004) menyatakan wanita mengalami durasi pengangguran yang lebih tinggi dari pada pria. Zarotiadis dan Theodossiou (2010) menemukan bahwa pekerja wanita menghadapi masa kerja yang jauh lebih singkat sehingga memiliki durasi pengangguran yang lebih lama.

Variabel berikutnya yang diidentifikasi dapat menyebabkan seseorang menjadi pengangguran adalah status perkawinan. Hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa status perkawinan merupakan variabel yang menentukan seseorang menganggur atau tidak, angkatan kerja yang sudah menikah memiliki kecenderungan tidak menganggur dibandingkan dengan yang belum menikah (Foley, 1997; Kaufman dan Hotchkiss, 2006; Theodossiou dan Zangelidis, 2009; Baah-Boateng, 2013; 2015; Albanesi dan Sahin, 2018).

Foley (1997) menemukan bahwa wanita yang sudah menikah ditemukan mengalami masa pengangguran yang jauh lebih lama dibandingkan dengan pria yang sudah menikah. Grogan, *et.al* (2001) menemukan bahwa durasi menganggur yang panjang terjadi pada pria yang belum menikah. Khan dan Yousef (2013) menyatakan bahwa status perkawinan menentukan durasi menganggur, mereka yang belum menikah cenderung menganggur lebih lama dibandingkan dengan yang

sudah menikah. Selanjutnya Kaufman dan Hotchkiss (2006) menyatakan bahwa status perkawinan menyebabkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi angkatan kerja, perempuan yang telah menikah dituntut untuk melakukan aktivitas rumah, dan pasar kerja yang tersedia kebanyakan menerima perempuan yang berstatus tunggal atau single. Berbeda dengan pria yang sudah menikah biasanya tidak memiliki hambatan yang berarti untuk memasuki pasar kerja sehingga akan memiliki durasi menganggur lebih pendek.

Kedudukan dalam rumah tangga juga diduga sebagai variabel yang mempengaruhi durasi menganggur. Seorang kepala rumah tangga bertanggung jawab akan rela bekerja apa saja demi memenuhi nafkah keluarganya. Lain halnya pada saat belum menikah karena masih ditopang keluarga. Khan dan Youssef (2013) menyatakan bahwa angkatan kerja yang berstatus kepala keluarga cenderung tidak menganggur dibandingkan dengan yang bukan kepala keluarga.

Wilayah tempat tinggal adalah suatu faktor yang penulis identifikasi dapat menjadikan seseorang menjadi pengangguran. Baah-Boateng (2015) menemukan lokasi tempat tinggal akan menentukan seseorang menjadi pengangguran atau tidak, dimana angkatan kerja yang tinggal di kota lebih rentan menganggur dari pada yang tinggal di desa. Foley (1997) menyatakan bahwa individu yang tinggal di daerah akan mengalami durasi menganggur yang lebih tinggi dibandingkan yang tinggal di kota. Grogan, *et.al* (2001) menemukan bahwa durasi menganggur yang panjang terjadi pada individu yang tinggal di luar dari kota besar (perdesasan).

Tingkat pengangguran merupakan sebuah indikator yang banyak digunakan dan sering didiskusikan untuk kesejahteraan suatu negara, namun diskusi tersebut sebagian besar berkonsentrasi kepada tingkat pengangguran nasional yang tidak memberikan informasi mengenai struktur pengangguran regional. Padahal data mengenai tingkat pengangguran regional menunjukkan adanya perbedaan antar daerah. Pengangguran memang masih menjadi masalah serius di Indonesia karena hampir diseluruh wilayah di Indonesia mengalami permasalahan yang sama dibidang ketenagakerjaan seperti pengangguran khususnya pengangguran terdidik. Namun karakteristik dari pengangguran itu sendiri pada masing-masing wilayah mengalami perbedaan sehingga diperlukan kajian secara spasial dalam mengatasi

pengangguran pada masing-masing wilayah. Penelitian ini akan mengkaji pengangguran terdidik dan durasi menganggur dari perspektif penawaran tenaga kerja pada tingkat nasional, wilayah kepulauan dan tingkat provinsi.

Menurut Taylor dan Bradley (1997) perbedaan regional dalam suatu negara lebih kuat dari pada perbedaan antar negara. Elhorst (2003) menyebutkan setidaknya tiga alasan utama mengapa perlu menganalisis tentang pengangguran di level regional. Pertama adalah bahwa adanya kesenjangan tingkat pengangguran regional menunjukkan kinerja pasar tenaga kerja di level regional dan mengacu kepada masalah-masalah yang ada pada level regional. Inilah sebabnya mengapa sangat penting bagi pemerintah yang ingin menghapus ketidaksetaraan di level regional harus menangani pasar tenaga kerja regional secara lebih serius. Kedua, sebagian besar studi ekonomi makro mencoba untuk menjelaskan kesenjangan pengangguran antar negara, dan menyimpulkan bahwa perbedaan dalam institusi pasar tenaga kerja adalah sumber utama dari adanya distribusi yang tidak merata. Namun di suatu negara, institusi semacam itu biasanya bersifat umum dan tidak dapat digunakan sebagai penjelasan. Teori-teori yang ada tentang pengangguran spasial menunjukkan bahwa pengangguran yang tinggi di beberapa wilayah harus dikompensasi oleh faktor-faktor lain, oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi variabel yang dapat menjelaskan perbedaan regional yang ada dalam keseimbangan jangka panjang. Alasan ketiga adalah bahwa kesenjangan pengangguran regional berpotensi menyebabkan inefisiensi. Jika berhasil ditangani, maka hal ini kemungkinan akan memberikan manfaat yang besar seperti peningkatan output nasional dan penurunan tekanan inflasi berkat penurunan kesenjangan tingkat pengangguran di level regional (Taylor dan Bradley 1997).

Penelitian ini akan melakukan kajian tentang peluang tenaga kerja terdidik menjadi pengangguran terdidik serta durasi menganggurnya di Indonesia beserta faktor penentu yang mempengaruhinya mulai pada tingkat nasional, tingkat wilayah kepulauan dan tingkat provinsi. Penelitian nantinya akan merekomendasikan beberapa kebijakan dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terdidik di Indonesia baik dari sisi durasinya maupun dari sisi kuantitasnya.

B. Rumusan Masalah

Tingkat pengangguran terdidik di Indonesia pada tahun 2016 sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 36,91% menjadi 30,74% namun pada tahun 2017 jumlah pengangguran terdidik kembali meningkat menjadi 31,76% yang terdiri dari 11,41% tamat SMK, 8,29% tamat SMA, 6,88% tamat Akademi/Diploma dan 5,18% tamat Universitas. Pada tahun 2018 total pengangguran terdidik adalah 31,10% yang terdiri dari 11,24% tamat SMK, 7,95% tamat SMA, 6,02% tamat Akademi/Diploma dan 5,89% tamat Universitas (BPS, 2019).

Pengangguran terdidik pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan dan didominasi oleh tamatan SMK (BPS, 2018). Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Penyebab pengangguran terdidik dilihat dari sisi penawaran diantaranya adalah tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, gender, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga dan wilayah tempat tinggal.

Pada sisi penawaran diketahui bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja periode 2016 dan 2017 mengalami peningkatan dari 8,42 tahun menjadi 8,53 tahun (BPS, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja mengalami peningkatan. Namun jika dikaitkan dengan pengangguran maka diketahui dengan meningkatnya tingkat pendidikan ternyata tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran dan justru malah angka pengangguran semakin meningkat.

Berdasarkan permasalahan penelitian ini maka masalah utama penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh potensi kemampuan tenaga kerja terdidik terhadap probabilitas menganggur di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh potensi kemampuan tenaga kerja terdidik terhadap probabilitas durasi menganggur di Indonesia?
3. Bagaimana karakteristik sosio demografi pengangguran terdidik di Indonesia?

4. Apa implikasi kebijakan untuk menurunkan pengangguran terdidik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Pengaruh potensi kemampuan tenaga kerja terdidik terhadap probabilitas menganggur di Indonesia
2. Bagaimana pengaruh potensi kemampuan tenaga kerja terdidik terhadap probabilitas durasi menganggur di Indonesia
3. Bagaimana karakteristik sosio demografi pengangguran terdidik di Indonesia?
4. Merumuskan kebijakan dalam menurunkan pengangguran terdidik di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan teori, pengembangan metodologi dan rekomendasi kebijakan. Berikut ini dijelaskan manfaatnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Teori
 - a. Memperkaya teori-teori tentang pengangguran tenaga kerja terdidik di Indonesia yang dilihat dari penawaran tenaga kerja
 - b. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam kesesuaian materi yang diterima di perkuliahan dengan kenyataan di lapangan.
2. Pengembangan Metodologi

Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam melakukan penelitian tentang pengangguran terdidik dan durasi menganggur tenaga kerja terdidik di Indonesia pada tingkat nasional, wilayah kepulauan dan tingkat provinsi.
3. Rekomendasi Kebijakan
 - a. Tersedianya data dan informasi tentang karakteristik pengangguran terdidik di Indonesia pada tingkat nasional, wilayah kepulauan dan tingkat provinsi.

- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di Indonesia untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam rangka penurunan jumlah pengangguran terdidik.
- c. Sebagai acuan bagi dunia pendidikan khususnya SMA/ sederajat dan perguruan tinggi dalam merumuskan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengkaji pengangguran terdidik dan durasi menganggur tenaga kerja terdidik di Indonesia dari sisi penawaran tenaga kerja. Objek penelitian ini adalah seluruh wilayah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi. Data dikumpulkan dari raw data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus 2017. Data pendukung adalah data publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia dan BPS Provinsi Sumatera Barat.

F. Kebaruan Penelitian

Adapun kebaruan penelitian ini yaitu: 1) memproksi kemampuan tenaga kerja terdidik dari tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja dan umur; 2) menganalisis dua isu secara bersamaan yaitu pengangguran terdidik dan durasi menganggur pada tingkat nasional, tingkat kepulauan dan tingkat provinsi; 3) membagi durasi menganggur menjadi dua kelompok yaitu durasi menganggur pendek dan durasi menganggur lama, dimana kebanyakan peneliti sebelumnya meneliti tentang durasi menganggur yang diukur dengan satuan waktu (bulan atau tahun).

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan disertasi ini lebih terarah dan mudah dipahami, maka penulis mengemukakan pokok-pokok uraian dari tiap-tiap bagian pada disertasi sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan, akan membicarakan beberapa pokok pikiran yang melandasi perwujudan penelitian secara keseluruhan yang meliputi, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kebaruan penelitian dan sistematika penulisan.

- Bab 2 Tinjauan Pustaka, akan membahas pendekatan teori-teori pendukung yang berkaitan dengan variabel penelitian, tinjauan literatur, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.
- Bab 3 Metodologi Penelitian, berisikan pembentukan model penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, gambaran umum Sakernas, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan dan definisi operasional variabel penelitian.
- Bab 4 Kondisi Perekonomian, Investasi, IPM, Kependudukan dan Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kebijakan Pemerintah Mengurangi Pengangguran, yang berisikan tentang gambaran kondisi perekonomian, keadaan investasi dan IPM, keadaan kependudukan dan pendidikan serta ketenagakerjaan serta bentuk-bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi pengangguran di Indonesia.
- Bab 5 Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan tentang karakteristik pengangguran terdidik di Indonesia, hasil analisis data untuk pengujian factor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik dan durasi menganggur serta pembahasan hasil penelitian
- Bab 6 Penutup, merupakan bab penutup dari penelitian yang dilakukan yang berisikan kesimpulan, saran, implikasi kebijakan dan keterbatasan penelitian.

